

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu penentu ke efektifitas dan kemajuan bagi sebuah organisasi (Hayati & Yulianto, 2021). Pengembangan ataupun pemberdayaan masyarakat adalah salah satu komitmen dalam memberdayakan masyarakat tingkat bawah sehingga mereka memiliki berbagai pilihan nyata menyangkut dan mengenai masa depannya (Hamid, 2018). Masyarakat tingkat bawah ini umumnya terdiri dari orang-orang lemah, tidak berdaya, dan miskin karena tidak memiliki sumber daya manusia atau tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol sarana-sarana produksi yang ada baik karena faktor sosial maupun Pendidikan (Zubaedi, 2013). Masyarakat tingkat bawah ini umumnya terdiri atas: kaum buruh, Petani penggarap, petani berlahan kecil, para nelayan, masyarakat hutan, kalangan pengangguran, dan orang-orang cacat (Zubaedi, 2013). Rendahnya Sumber daya Manusia juga menjadi salah satu penyebab pengangguran. Pengangguran mengakibatkan orang-orang tidak memiliki pendapatan dan mendorong mereka jatuh ke jurang kemiskinan. Secara umum pemerintah mengatasi pengangguran dengan mengupayakan memperluas kesempatan kerja, baik di sektor pemerintahan maupun sektor swasta (Ishak, 2018). Salah satu penyebab manusia memiliki sumber daya yang rendah adalah karena faktor Pendidikan yang kurang (Itang, 2015). Mereka mengalami kurang Pendidikan karena banyak faktor seperti kurangnya biaya, bahkan sampai ada faktor dari diri manusia tersebut yang malas dan tidak ingin mendapatkan pendidikan yang

lebih baik dan layak. Selain itu juga ada faktor - faktor lainnya seperti faktor ekonomi (kemiskinan). Selain itu terdapat juga faktor lingkungan, faktor internal dari individu. Faktor yang berhubungan dengan lingkungan menurut Wells yang dikutip dalam (Widiastuti, 2022) Seperti tidak adanya dukungan dan respon dari masyarakat mengenai dukungan pendidikan. Tidak jarang juga ditemui banyaknya anak yang putus sekolah dikarenakan faktor ekonomi. Keluarga yang tidak mampu seringkali menghadapi tekanan keuangan yang membuat sulit untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka. Anak-anak dari latar belakang ekonomi yang rendah mungkin dipaksa untuk bekerja demi membantu menyokong keluarga mereka. Pendidikan merupakan modal utama bagi manusia untuk meningkatkan kemampuan baik secara formal berupa pengetahuan maupun informal berupa keterampilan untuk mempermudah memiliki peluang dalam mencari pekerjaan, yang mana pada saat ini nilai daya saing dalam dunia kerja sangat tinggi dan tingkat pengangguran di suatu wilayah dapat berkurang (Mouren et al., 2022).

Sebagai remaja yang merupakan generasi penerus bangsa maka kita harus dibekali oleh Pendidikan (Yuristia, 2018). Hal ini dikarenakan di dalam proses pendidikan inilah yang nantinya akan mengembangkan kreativitas dan peningkatan keterampilan agar remaja menjadi sumber daya manusia yang berkualitas (Yuristia, 2018). Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan untuk pengembangan potensi, minat dan bakat dirinya agar mereka kelak dapat menjadi penerus bangsa yang memiliki kemampuan intelektual sehingga dapat dijadikan sumber daya manusia yang berpotensi dalam memimpin bangsa dan negara kearah yang lebih baik (Tamba et al., 2014). Pemerintah Indonesia sendiri sudah menjamin

pendidikan warga negara nya termasuk remaja yang tercantum dalam salah satu UUD 1945 yang berbunyi :

“Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya” sangat jelas menyebutkan, pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar warga negara.”

Sumber:(<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18302&menu=2#:~:text=Padahal%2C%20sambung%20Rafi%2C%20Pasal%2031,membiayai%20pendidikan%20dasar%20warga%20negara>)Diakses pada 19 September 2023

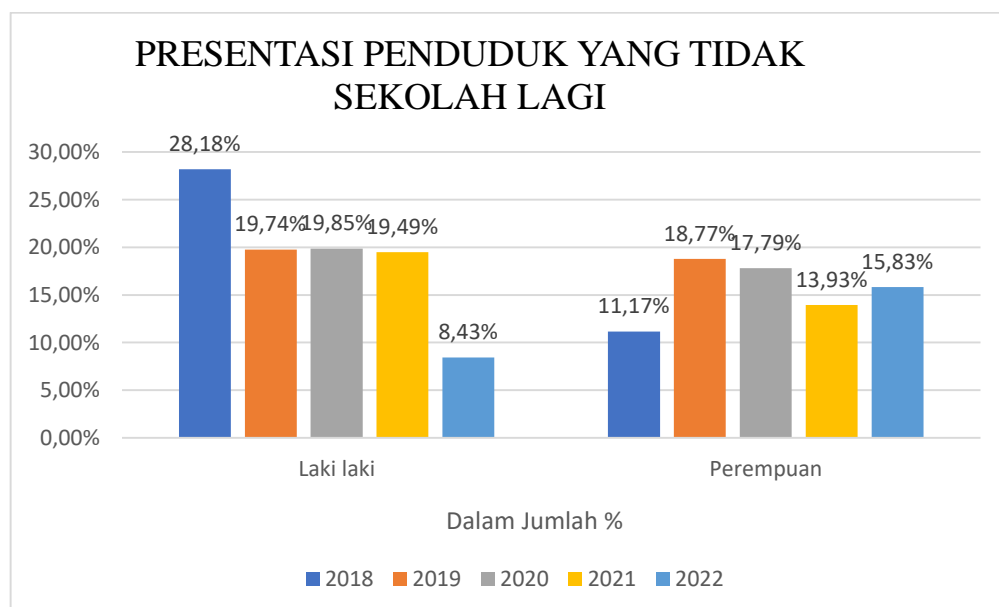
Remaja putus sekolah atau terlantar merupakan salah satu masalah sosial yang harus mendapatkan perhatian khusus, karena dampak yang ditimbulkan tidak lagi hanya dirasakan oleh individu remaja itu sendiri, tetapi juga oleh masyarakat. (Tamba et al., 2014) Dampak yang ditimbulkan yaitu pengangguran, kriminalitas, kemiskinan dan kenakalan remaja. Diperlukan upaya penanganan remaja putus sekolah atau terlantar untuk mengurangi dampak negatif yang mereka timbulkan. Sementara itu, angka anak putus sekolah adalah indikator statistik yang mencerminkan jumlah individu di suatu populasi yang meninggalkan pendidikan formal sebelum menyelesaikan tingkat pendidikan yang ditentukan. Angka indidapatkan dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk kebijakan pendidikan, aksesibilitas, dan faktor-faktor sosial yang telah disebutkan di atas. Tingkat anak putus sekolah yang tinggdidapatkan menjadi tanda masalah dalam sistem pendidikan suatu negara dan memerlukan perhatian dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat secara keseluruhan untuk menanggulangnya. Seperti yang ada dalam kutipan berita berikut mengenai dampak pengangguran bagi lingkungan:

”Kalau putus sekolah, anak itu akan cenderung nakal. Jadi, kita menemukan banyak bandit, penjahret, dan perampok itu dari anak putus sekolah,” Tri Rismaharini

Sumber: (<https://www.jawapos.com/surabaya-raya/01247140/risma-ungkap-putus-sekolah-biang-anak-nakal-di-surabaya>) Diakses pada 18 Oktober 2023

Dengan demikian, tidak bersekolah dapat menjadi faktor risiko yang signifikan untuk pengangguran, dan upaya untuk meningkatkan akses dan partisipasi dalam pendidikan dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran di suatu populasi. Kebijakan pendidikan yang inklusif, pelatihan keterampilan, dan dukungan bagi individu yang kembali ke sekolah atau pelatihan dapat membantu meredakan hubungan negatif antara tidak sekolah dan pengangguran. Seperti yang ada dalam grafik berikut menunjukkan angka anak yang tidak Sekolah Kabupaten Nganjuk tahun 2018-2022 :

Tabel 1.1 Angka Anak yang Tidak Sekolah lagi di Kabupaten Nganjuk  
2018-2022 :



Sumber : (Badan Pusat Statistik, 2023) diolah oleh Penulis

Data dalam grafik di atas merupakan data yang menunjukkan angka anak tidak sekolah lagi di Kabupaten Nganjuk dari tahun 2018 – 2022 dalam grafik di atas perbandingan anak yang tidak sekolah dari tahun 2018 ke 2019 untuk jenis kelamin laki – laki mengalami penurunan sebanyak 8,44% dan jika dilihat dari tahun 2018 ke tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun ke tahunnya. Sedangkan untuk jenis kelamin perempuan di tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami peningkatan sebanyak 7,60% dan untuk angka penurunan dari tahun 2018 – 2022 masih terlihat sedikit dan masih terjadi peningkatan hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan adanya perbaikan dan juga adanya peningkatan.

Dalam upaya untuk mengurangi remaja yang putus sekolah ataupun terlantar, diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, baik dari pihak pemerintah sendiri maupun juga pihak masyarakat serta swasta (Al Ansari et al., 2020). Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan pelayanan sosial. Pelayanan sosial tersebut bertujuan agar remaja yang putus sekolah ataupun kurang bekal ilmunya untuk melanjutkan ke dunia kerja tetap mendapatkan pendidikan di luar sekolah (Tamba et al., 2015) yang dapat dijadikan bekal untuk memperoleh pekerjaan sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. (Tamba et al., 2014).

Salah satu cara untuk menyikapi hal tersebut pemerintah Indonesia telah melakukan upaya strategis melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk menetapkan program prioritas penanganan masalah kesejahteraan sosial kepada

dinas sosial di seluruh Indonesia (Purnamawati, 2020) , khususnya di daerah sosial provinsi Jawa timur dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT). Dinas sosial Provinsi Jawa timur adalah salah satu dinas atau institusi yang berkedudukan di tingkat provinsi yang membawahi berbagai UPT kota se-provinsi Jawa timur. Salah satu tugas Dinas Sosial adalah memberikan kelayakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsii sosialnya.

Bentuk UPT Pelayanan sosial untuk remaja yang putus sekolah yaitu UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja (UPT PSBR) yang terdapat di empat lokasi yaitu: UPT PSBR Blitar, UPT PSBR Bojonegoro, UPT PSBR Jombang dan UPT PSBR Pamekasan. Di dalam program pendidikan Pelayanan Sosial Bina Remaja ini nantdidapatkan berdampak positif bagi remaja. Karena di dalam program Pelayanan Sosial Bina Remaja ini bertujuan untuk dapat mengurangi kenakalan remaja yang sekarang ada di masyarakat, serta dapat membantu agar semua remaja yang mengikuti program ini menjadi manusia yang kreatif dan mandiri dan dapat terserap dalam dunia kerja yang dapat mengangkat perekonomian (Badan Standar Nasional, 2022).

Pelayanan Sosial Bina Remaja adalah salah satu program dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang turun ke UPT sebagai salah satu Unit untuk melakukan pemberdayaan dan pelatihan kepada remaja yang berusia 15 – 21 tahun. Pelayanan sosial yang dimaksud adalah pelayanan yang diberikan kepada remaja yang putus sekolah ataupun terlantar dengan cara memberikan mereka bimbingan layaknya berada disekolah. Dalam melakukan pelayanan terdapat banyak

bimbingan seperti Bimbingan fisik, mental, agama dan bimbingan keterampilan yang dimana agar mereka menjadi manusia yang kreatif, memiliki bakat keterampilan dan mandiri.

Pelayanan sosial yang diberikan ini tentunya harus sesuai dengan kebutuhan remaja yang putus sekolah ataupun kurang ilmunya mengenai bidang yang diberikan. Pelayanan sosial yang dapat diberikan yaitu berupa pembinaan bagi mereka yang ingin mengikuti bimbingan. Bimbingan yang diberikan yaitu pimpinan mental, agama, sosial dan fisik lalu juga terdapat bimbingan keterampilan. Selain itu cara mengalokasikan sumber daya manusia ini harus efektif dan fokus pada perkembangan infrastruktur dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan di sektor sektor seperti sektor Industri.

Dalam penelitian ini didasarkan juga penelitian terdahulu yang dimana juga membahas hal yang sama yaitu mengenai program PSBR. Seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Dede Yaksan (Yaksan et al., 2017) yang berjudul Pelaksanaan Pemberdayaan Anak Terlantar dan Remaja Putus Sekolah di Panti Sosial Bina Remaja Rumbai Kota Pekanbaru Tahun 2011-2015 dan hasilnya adalah dalam pelaksanaan pembinaan anak terlantar meliputi penyampaian materi menggunakan bahasa sederhana dan diselingi dengan contoh kehidupan sehari-hari, metode yang digunakan adalah metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan praktek serta media pembelajaran yang digunakan seperti modul, leaflet, dan film. Sikap pembimbing dalam kegiatan pemberdayaan juga ramah, humoris, tegas, dan akrab. Lingkungan atau suasana belajar yang menyenangkan membuat anak tidak merasa bosan dalam mengikuti kegiatan yang dimana hal ini akan mempengaruhi program Pelayanan

Sosial Bina Remaja ini. Sedangkan penelitian dari Tamba (Tamba et al., 2014) yang berjudul “Pelayanan Sosial Bagi Remaja Putus Sekolah” dan membahas mengenai keberhasilan program Pelayanan Sosial bina Remaja yang dimana hasilnya adalah ketika remaja putus sekolah yang telah mendapatkan pelayanan sosial telah mampu melaksanakan tugasnya secara baik di masyarakat dan mandiri dalam memenuhi kebutuhannya, maka pelayanan sosial tersebut dikatakan berhasil. Namun sebaliknya, ketika remaja putus sekolah yang telah mendapatkan pelayanan sosial belum mampu melaksanakan perannya di masyarakat dan belum dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri, berarti terdapat kesalahan pada pelaksanaan pelayanan sosialnya ataupun terhadap remaja itu sendiri.

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan memiliki relevansi dengan penelitian yang sedang dilakukan dengan topik yang sama yaitu pemberdayaan pada remaja. Walaupun topiknya serupa, perbedaan utamanya terletak pada lokasi penelitian dan periode waktu penelitian yang berbeda. Kesamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini adalah pendekatan kualitatif yang digunakan dalam membahas mengenai efektivitas program Pelayanan Sosial Bina Remaja (PSBR). Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa putus sekolah memiliki dampak jangka panjang yang signifikan pada individu dan masyarakat. Menurut laporan UNESCO (2015), anak-anak yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar lebih rentan terhadap kemiskinan dan memiliki akses yang lebih terbatas terhadap pekerjaan yang layak. Faktor ekonomi sering menjadi penyebab utama putus sekolah, seperti yang dijelaskan oleh Bourdieu dan Passeron (1977) dalam teori reproduksi sosial mereka, di mana ketidakmampuan finansial menyebabkan



ketidakseimbangan dalam akses pendidikan antara kelas sosial yang berbeda. Intervensi melalui program pelayanan sosial telah diakui sebagai strategi efektif untuk mengatasi masalah putus sekolah dan meningkatkan kesejahteraan remaja. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hallinan (2008), program bimbingan dan pendidikan keterampilan yang diselenggarakan oleh lembaga sosial dapat memberikan dukungan penting bagi remaja yang putus sekolah. Program seperti Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Bina Remaja (UPT PSBR) di Jawa Timur, yang menawarkan berbagai bentuk bimbingan dan pelatihan, merupakan contoh konkret dari upaya ini (Umayah, 2013).

Upaya untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat yang kurang berpendidikan di Kabupaten Nganjuk telah dilakukan dengan cara kerja sama mengikuti program pemberdayaan antara Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dengan Unit Pelaksana Teknis yang tersebar dalam 4 lokasi yaitu UPT PSBR Blitar, UPT PSBR Bojonegoro, UPT PSBR Jombang, UPT PSBR Pamekasan. Dinas Sosial Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu anggota UPT PSBR yang tersebar di Jawa Timur seperti yang ada dalam kutipan berita sebagai berikut :

NGANJUK, PING- Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Nganjuk mengajak remaja yang putus sekolah untuk mengikuti program pelatihan keterampilan di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR). Hal ini disampaikan oleh Edy Darijanto selaku Kasi Perlindungan dan Jaminan Sosial saat menjadi narasumber di Talkshow RSAL 105,3 FM, Selasa (24/05/2022). UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja (PSBR) merupakan program andalan dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Tujuan dari PSBR yaitu membina dan menciptakan kesejahteraan bagi remaja putus sekolah agar mampu menjadi pribadi yang berguna di masyarakat. Terdapat beberapa keterampilan yang akan diajarkan di PSBR, yakni Pertukangan Kayu, Otomotif, Jahit, Las, Border dan Salon Kecantikan. “Segala bentuk

pepelatihan di PSBR gratis dan tidak dipungut biaya sepeserpun. Selain itu kami juga memberikan bimbingan lain, yakni bimbingan fisik, sosial, dan mental,” ujar Edy dalam berita.

Sumber: (<https://www.nganjukkab.go.id/detail-kabar/kenali-lebih-dekat-program-andalan-dinas-sosial-panti-sosial-bina-remaja>)

Diakses pada 19 September 2023

Dalam kutipan berita di atas Kabupaten Nganjuk adalah salah satu peserta atau anggota dari UPT PSBR. Di Kabupaten Nganjuk instansi yang menjalankan program dengan UPT PSBR adalah Dinas Sosial PPPA (Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) lebih tepatnya di bidang Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan. Menurut data terbaru dari Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk jumlah peserta yang menerima pelayanan sosial bina remaja di Kabupaten Nganjuk dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan. Ini mencakup remaja dari berbagai latar belakang sosial-ekonomi, termasuk mereka yang putus sekolah, atau mengalami masalah keluarga. Data ini menunjukkan pentingnya keberadaan layanan sosial bina remaja dalam memberikan dukungan dan bimbingan kepada remaja yang membutuhkan, serta perlunya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan ini untuk mencapai dampak yang lebih positif bagi perkembangan dan kesejahteraan remaja di masyarakat. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan jumlah peserta binaan PSBR (Pelayanan Sosial Bina Remaja) dari Kabupaten Nganjuk dari tahun 2017-2022:

Tabel 1.2 Peserta Pelayanan Sosial Bina Remaja Kabupaten Nganjuk  
tahun 2017-2022

Kabupaten	Jumlah Peserta					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nganjuk	20	19	10	21	18	10

Sumber : (Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk, 2023) diolah oleh

Penulis

Berdasarkan data peserta PSBR (Pelayanan Sosial Bina Remaja) di atas menunjukkan bahwa adanya penurunan dan juga adanya peningkatan terhadap minat mengikuti Program binaan oleh Pelayanan Sosial Bina Remaja. Penurunan yang terjadi dari tahun 2020 – tahun 2022 cukup memiliki selisih yang banyak yaitu 11 peserta, hal ini didapatkan terjadi karena banyak faktor seperti yang dikatakan oleh salah satu koordinator dari Kabupaten Nganjuk yang menangani program Pelayanan Sosial Bina Remaja ini seperti yang ada dalam kutipan wawancara berikut :

“Peserta PSBR ini berkurang karena biasanya mereka tidak betah waktu mengikuti binaan disana, jadi mereka memutuskan untuk pulang, kalau mengenai berkurangnya peserta karena faktor dari masyarakat yang kurang mengetahui mengenai program PSBR ini mbak” ujar Bapak Lasidi

Sumber : Wawancara pada 16 Oktober 2023

Dari data tabel di atas menunjukkan bahwa peserta/klien Pelayanan Sosial Bina Remaja dari kabupaten Nganjuk tergolong di angka yang cukup banyak. Namun dalam pelaksanaan Program Pelayanan Sosial Bina Remaja ini masih terdapat hambatan lain seperti kurang tahunya masyarakat mengenai program

PSBR (Pelayanan Sosial Bina Remaja) yang sudah ada, seperti yang ada dalam kutipan berita berikut dijelaskan bahwa Kabupaten Nganjuk tidak mengirimkan surat karena tidak ada peserta yang mengikuti program Pelayanan Sosial Bina Remaja. Kabupaten Nganjuk pada tahun 2019 dan tahun 2022 mengalami penurunan peserta dan kurang ada peminat dalam hal ini berarti masih kurang tahunya masyarakat mengenai adanya Program Pelayanan Sosial Bina Remaja (PSBR), berikut adalah kutipan berita mengenai UPT PSBR :

“Memang yang PSBR Nganjuk dan Blitar tidak mengirimkan surat kepada kami karena pada tahun sebelumnya tidak ada peminat. Tetapi, kami bisa mengupayakan dengan menanyakan ke PSBR yang bersangkutan. Yang penting ada dulu peminatnya,” ujarnya.”

Sumber : (<https://madiuntoday.id/berita/2023/06/08/bukan-pepelatihan-kerja-sembarangan-selesai-pepelatihan-dapat-bantuan-modal-peralatan>) Diakses pada 18 Oktober 2023

Selain hambatan di atas terdapat juga hambatan lain seperti adanya peserta/klien dari kabupaten yang berada di UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja yang tiba – tiba ingin keluar hal ini sesungguhnya bukan saja menjadi tanggung jawab salah satu pihak saja, tetapi merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan juga petugas pelaksana program secara keseluruhan. Hal ini disebabkan karena selama ini aksi-aksi penanganan remaja putus sekolah masih dilakukan secara terpisah, sektoral. Akibatnya efektivitas pelayanan menjadi kurang maksimal. Seperti yang ada dalam salah satu kutipan berita berikut :

“Segala bentuk pelatihan di PSBR gratis dan tidak dipungut biaya sepeserpun. Selain itu kami juga memberikan bimbingan lain, yakni bimbingan fisik, sosial, dan mental,” ujar Edy.

Sumber : (<https://www.nganjukkab.go.id/detail-kabar/kenali-lebih-dekat-program-andalan-dinas-sosial-panti-sosial-bina-remaja>)  
Diakses pada 18 Oktober 2023

Namun, perlu juga diperhatikan beberapa tantangan yang mungkin dihadapi oleh PSBR. Pertama, pendanaan untuk menyediakan pelatihan dan bimbingan gratis bisa menjadi beban yang signifikan, sehingga memerlukan dukungan berkelanjutan dari pemerintah atau donatur swasta. Kedua, kualitas pelatihan dan bimbingan yang diberikan harus dijaga agar benar-benar efektif dalam membantu para remaja. Ketiga, akses ke program ini perlu dipastikan merata, sehingga semua remaja yang membutuhkan bisa mendapat manfaat tanpa terkendala oleh lokasi atau informasi. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, PSBR dapat terus memberikan kontribusi positif bagi perkembangan remaja, membantu mereka menjadi individu yang mandiri dan berdaya saing.

Walaupun di dalam pelatihan ini tidak dipungut biaya namun dalam kutipan berita tersebut menjelaskan bahwa adanya permasalahan. Hal ini bisa disebabkan karena tidak mengetahui karakter peserta Pelayanan Sosial Bina Remaja yang tidak bisa mengikuti salah satu faktor dari bimbingan fisik, sosial dan mental dari hal inilah yang mungkin menyebabkan peserta Pelayanan Sosial Bina Remaja ini tidak betah di tempat pembinaan berasal dari salah satu faktor tersebut. Dalam hal ini berarti harus dilakukan pendekatan yang lebih agar mengetahui berbagai karakter peserta dan membuat mereka merasa nyaman saat berada di lokasi/asrama Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Bina Remaja.

Dalam mengikuti Program Pelayanan Sosial Bina Remaja ini Kabupaten Nganjuk juga merupakan salah satu Kabupaten yang pesertanya mendapat bantuan alat

pengembangan. Bantuan alat ini didasarkan pada pemantauan dari UPT yang terkait dan juga pemantauan dari Dinas Sosial Provinsi. Peserta/klien yang mendapatkan bantuan adalah para peserta yang mampu mengembangkan usahanya selama 2-3 tahun setelah mengikuti Program Pelayanan Sosial Bina Remaja. Meskipun bantuan awal diberikan, keberlanjutan usaha para penerima bantuan harus dipantau. Bantuan satu kali mungkin tidak cukup untuk memastikan kesuksesan jangka panjang. Mekanisme dukungan berkelanjutan, seperti akses ke modal tambahan dan bimbingan bisnis, sangat penting. Seperti yang ada dalam kutipan berita berikut :

Nganjuk, Jurnal Jatim – Sebanyak Tiga orang warga asal Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur menerima bantuan sosial (bansos) berupa alat-alat penunjang aktivitas berwirausaha dari Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jawa Timur. Ketiga penerima bansos tersebut adalah Syahrul F, warga Desa Kepel, Kecamatan Ngetos. Kemudian Achmad S warga Desa Tanjungtani, Kecamatan Prambon dan Puji L. Warga Desa Rowoharjo, Kecamatan Prambon. Syahrul dan Achmad, merupakan eks klien Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pelayanan Sosial Bina Remaja (PSBR) Blitar. Sedangkan Puji L adalah eks klien UPT PSBR Bojonegoro. Kepala Dinas Sosial, PPPA Kabupaten Nganjuk, Nafhan Tohawi mengatakan penyerahan bantuan alat wirausaha itu dilaksanakan pada Rabu (21/07/2021) lalu. Nafhan Tohawi berharap kepada para penerima bantuan bisa mengembangkan diri dengan menjadi wirausahawan sesuai dengan bantuan tersebut. “Semoga dengan bantuan indidapatkan meningkatkan perekonomian keluarga masing-masing,” ujar Nafhan berharap, Senin (26/7/2021). Sumber : (<https://jurnaljatim.com/2021/07/tiga-orang-asal-nganjuk-terima-bantuan-alat-wirausaha-dari-dinsos-jatim/>) Diakses pada 18 Oktober 2023

Kabupaten Nganjuk memiliki jumlah remaja yang cukup banyak, dan ada kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam hal pelayanan sosial untuk mereka. Hal ini menjadi salah satu alasan penulis fokus pada wilayah ini agar penelitian dapat memberikan dampak yang lebih langsung pada populasi yang membutuhkan dan

juga berdasarkan ketersediaan sumber daya yang mendukung penelitian, seperti fasilitas pelayanan sosial, tenaga ahli, dan dukungan dari pemerintah daerah atau organisasi lain yang terlibat dalam pembangunan remaja.

Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk juga telah mengembangkan pendekatan-pendekatan inovatif dalam pelayanan sosial bagi remaja, melalui program-program yang ada. Pada penelitian di sindidapatkan mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dan strategi-strategi yang berhasil. Masyarakat di Kabupaten Nganjuk mungkin memiliki tingkat partisipasi yang tinggi dalam program-program pelayanan sosial bagi remaja hanya saja masyarakat kurang tahu mengenai program ini karena kurangnya sosialisasi yang maximal. Hal indidapatkan menjadi tantangan yang perlu di atasi dalam pengembangan pelayanan sosial bagi remaja. Selain hal di atas masih terdapat juga hambatan mengenai kuota yang diberikan hanya sedikit.

Dari latar belakang masalah ini dirasakan perlu untuk diteliti tentang efektivitas program pelayanan sosial bina remaja dalam membina dan meningkatkan sumber daya manusia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan sebagai bahan konseling agar bisa meningkatkan konsep diri pada remaja putus sekolah serta bahan pertimbangan bagi pengurus untuk lebih meningkatkan dukungan atau kegiatan yang berkaitan dengan konsep pada remaja yang ada di Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Bina Remaja. Maka dari itu peneliti mengangkat judul **“EFEKTIVITAS PROGRAM PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA STUDI PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN NGANJUK”** dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan

studi kasus menggunakan teori Efektivitas Program Menurut (Budiani, 2007) untuk menganalisa efektivitas sebuah program.

## **1.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Efektivitas Program Pelayanan Sosial Bina Remaja di Kabupaten Nganjuk?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan dan hambatannya dalam program Pelayanan Sosial Bina Remaja di Kabupaten Nganjuk?

## **1.3 Tujuan**

Mengacu pada rumusan masalah di atas maka dapat ditarik sebuah tujuan dalam penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui bagaimana Efektivitas program Pelayanan Sosial Bina Remaja di Kabupaten Nganjuk
2. Mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan dan hambatannya dalam program Pelayanan Sosial Bina Remaja di Kabupaten Nganjuk

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah ilmu pengetahuan sekaligus menambah wawasan secara nyata khususnya dalam kajian Efektivitas program sehingga dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti.

2. Bagi Stakeholder



Sebagai panduan dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang akan diambil dalam visi membangun sumber daya manusia yang unggul.